

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Kinerja pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat dari analisis varians secara keseluruhan rata-rata realisasi pendapatannya dibawah jumlah yang dianggarkan sehingga selisih pendapatan yang diperoleh adalah selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*). Realisasi pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan terdapat pada kabupaten/kota tertentu dan pada tahun-tahun tertentu, yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Malaka.
2. Kinerja pendapatan daerah pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan dapat dikatakan cukup baik jika dilihat dari total pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang selalu selalu meningkat, walaupun terkadang realisasi pendapatan tidak melampaui jumlah yang dianggarkan namun kinerja pertumbuhan pendapatannya positif.
3. Kinerja pendapatan pemerintah kabupaten/kota jika dilihat dari Analisis Derajat Desentralisasi dapat dikatakan sangat kurang, karena skala interval Derajat Desentralisasi yang diperoleh antara 00,00%-10,00% saja dan ini

berarti bahwa PAD Kabupaten/Kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kemampuan sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerahnya, juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Timur belum memberikan kontribusi kepada total pendapatan daerah.

4. Kinerja pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dikatakan sangat tinggi karena skala interval Rasio Ketergantungan Keuangan daerah yang diperoleh adalah $>50,00\%$, dan ini berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur kurang mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan kurang mampu dalam membiayai pembangunan daerahnya masing-masing sehingga tingkat ketergantungan keuangan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangatlah tinggi, dan bisa dikatakan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.
5. Kinerja pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur jika dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki kemampuan daerah dengan predikat sangat kurang karena skala interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang diperoleh antara $00,00\%$ - $10,00\%$ saja dan ini berarti bahwa PAD Kabupaten/Kota se-provinsi Nusa

Tenggara Timur memiliki kemampuan sangat kurang dalam membiayai kegiatan Pemerintahannya dan kurang dalam meningkatkan PAD-nya dalam penggalan potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah yang sudah ada.

6. Kinerja pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur jika dilihat dari rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan sebagai berikut :

- a. Sangat Efektif (>100%), terdapat pada : Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka.
- b. Efektif (90% - 100%), terdapat pada : Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Rote Ndao.
- c. Cukup Efektif (80% - 90%), terdapat pada : Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Manggarai.
- d. Kurang Efektif (60% - 80%), terdapat pada : Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Sikka.

6.2 Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti menyarankan hal-hal berikut :

1. Dalam rangka menciptakan *good governance*, pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja terutama kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, karena Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh demi terwujudnya tujuan pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat meningkatkan kinerja pendapatan, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dengan menggalih dan mengelolah potensi-potensi daerahnya masing-masing, sehingga realisasi pendapatan setiap daerah dapat mencapai target yang dianggarkan, dan pendapatan diharapkan mengalami pertumbuhan secara positif, serta tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat menjadi lebih rendah juga kemandirian keuangan daerahnya semakin tinggi.

2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih dalam mengenai kinerja pendapatan pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sebagai referensi dalam penelitian pada tahun-tahun berikutnya mengenai kinerja pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok Edukasi, Solo.
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi: Kedua. Cetakan: Pertama. Yogyakarta. Penerbit: UPP STIM YKPN.
- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agustin, Fitriyah. 2007. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)*.
- B.Uno, Hamzah. 2008. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISPOL-UGM , 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPF
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPF, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri. (2001) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*, Jakarta : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Djahidin, Farid.1987.*Analisi Laporan Keuangan*. Penerbit Erlangga Jakarta.
- Eka Warna, Shinta Unjaswati, Sam, Iskandar, dan Rahayu, Sri. 2009. *Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi*. Jurnal Cakrawala Akuntansi, Volume I, NoI, Februari 2009.
- Halim, Abdul. 2002b. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim , Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Harmanto. 1980. *Analisis Laporan Keuangan*. BPFE Yogyakarta.
- Lampa, Lady. 2016. *Analisis Kinerja Pendapatan Pada Dinas Pengelolaan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi daerah*.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2014*. Jakarta.
- Rahmatina, Aulia, Z.N. 2011. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009*.
- Rosalina, Eka. 2008. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus di di Provinsi Sumatera Barat.Thesis S2)*. Universitas Gadjah Mada
- Sragen, Yuliana.2013. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Di Tinjau Dari Rasio Keuangan* (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen Periode 2010-2012).
- Sugeha, F.F., Karamoy, Herman., dan Pusung, R.J. 2015. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013*.
- _____. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

_____. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan Daerah*.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Yuwono, Soni dkk. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang : Bayu Media Publising.